

IMPLEMENTASI SISTEM BUKITTINGGI GEMILANG SEBAGAI STRATEGI PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL

**Adria Fahyumi Alfanza, Syamsir, Afifah Alya Syafira, Alimah Tusak Diyah, Alwi
Abrar Rusli, Anisa Delia Safitri, Annisa Fadillah**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Padang

E-mail: adriafahyumi24@gmail.com

Abstrak

Transformasi pelayanan publik berbasis digital menjadi tuntutan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Bukittinggi Gemilang sebagai strategi perbaikan layanan publik di Kota Bukittinggi melalui integrasi berbagai layanan pemerintahan dalam satu aplikasi digital. Metode yang digunakan berupa studi literatur dan analisis fitur aplikasi untuk menilai relevansi sistem terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Bukittinggi Gemilang mampu meningkatkan aksesibilitas informasi, efisiensi proses pelayanan, dan akuntabilitas melalui transparansi data layanan. Selain itu, sistem ini memperkuat partisipasi masyarakat melalui dukungan fitur pelaporan dan kendali informasi. Namun, tantangan masih dijumpai, termasuk tingkat literasi digital masyarakat, kesiapan aparatur, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan keamanan data. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan guna memastikan inovasi digital berjalan konsisten dan inklusif.

Kata Kunci: *pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, aplikasi layanan, inovasi daerah, Bukittinggi Gemilang.*

Abstract

Digital transformation in public service has become essential to ensure effective, transparent, and responsive governance. This study analyzes the implementation of the "Sistem Bukittinggi Gemilang" as a strategic effort to improve public services in Bukittinggi City by integrating multiple governmental services into a unified digital platform. The research employs a literature review and application feature analysis to assess the system's relevance to public service needs. The findings indicate that the application enhances information accessibility, service efficiency, and accountability through transparent service data. It also strengthens public participation by providing reporting tools and centralized information channels. Nevertheless, challenges persist, including varying levels of digital literacy among citizens, government readiness, and the need to reinforce infrastructure and data

security. This study highlights the importance of continuous system maintenance to ensure that digital innovation remains inclusive, sustainable, and aligned with public expectations.

Keywords: *public service, digital government, service application, regional innovation, Bukittinggi Gemilang.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat menuntut layanan yang cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses, seiring berkembangnya teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi (Wahyudi & dkk, 2023). Fenomena ini mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan aplikasi layanan publik sebagai instrumen percepatan pelayanan dan penyederhanaan prosedur administrasi pemerintahan. Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota berkembang di Sumatera Barat turut berupaya mengadopsi konsep e-government dan smart city dalam meningkatkan daya saing daerah dan kualitas layanan publik (Sørensen et al., 2021).

Meskipun berbagai inisiatif pelayanan publik telah dijalankan sebelumnya, persoalan keterbatasan akses informasi, lamanya proses birokrasi, kurangnya integrasi layanan

antarlembaga pemerintahan, serta rendahnya efisiensi dalam pengelolaan administrasi masih menjadi keluhan masyarakat. Beberapa layanan publik masih menuntut kehadiran fisik, pengumpulan berkas berulang, dan penyampaian informasi manual yang rentan menimbulkan ketidakpastian waktu penyelesaian (Andriyan et al., 2024). Persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap layanan modern berbasis teknologi dan praktik layanan konvensional yang masih dominan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik di Kota Bukittinggi diperlukan bukan hanya sebagai tren digitalisasi, tetapi sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan yang responsif, mudah, dan terukur.

Merespons tuntutan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengembangkan Sistem Bukittinggi Gemilang, sebuah aplikasi terpadu yang memuat berbagai layanan dalam lingkup pemerintahan daerah. Aplikasi ini dirancang sebagai wadah layanan publik komprehensif, mencakup akses informasi pemerintah, layanan masyarakat, bantuan sosial, data kependudukan, informasi pariwisata,

pelaporan permasalahan publik, hingga layanan administratif di kelurahan dan perangkat daerah (Google Play, 2025). Tujuan utamanya adalah digitalisasi layanan agar masyarakat tidak lagi menghadapi proses birokrasi yang berbelit, sementara pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan secara real time. Dengan satu pintu aplikasi, layanan publik diharapkan terintegrasi, mudah dijangkau, dan minim hambatan administratif.

Namun, meskipun aplikasi ini menawarkan konsep layanan terpadu, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi. Penelitian terdahulu mengenai aplikasi layanan pemerintahan di Bukittinggi, seperti aplikasi SICANTIK maupun Sistem Bukittinggi Hebat, menunjukkan bahwa keberadaan teknologi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan (Jefri Al Hakim & Asmungi, 2024). Masih terdapat kendala seperti minimnya literasi digital, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, belum optimalnya fitur layanan, dan rendahnya tingkat pemanfaatan aplikasi oleh kelompok rentan atau masyarakat yang belum familiar dengan perangkat digital. Di sinilah terlihat gap penelitian yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi Sistem Bukittinggi Gemilang sebagai strategi perbaikan layanan publik, apakah benar mampu meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi kendala

pelayanan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dibutuhkan untuk melihat bagaimana aplikasi tersebut berfungsi bukan hanya sebagai alat teknologi, tetapi sebagai strategi reformasi birokrasi modern.

Solusi yang ditawarkan melalui keberadaan Sistem Bukittinggi Gemilang dinilai relevan dan realistis karena digitalisasi merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menjawab persoalan pelayanan publik masa kini. Digitalisasi memungkinkan integrasi data lintas instansi, otomasi proses administrasi, pelacakan layanan berbasis sistem, dan penyediaan informasi real time tanpa batasan jarak serta waktu. Pemilihan solusi berbasis aplikasi dibandingkan perluasan layanan tatap muka tradisional menunjukkan perubahan paradigma bahwa pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada pertemuan fisik, melainkan pada aksesibilitas dan efisiensi. Aplikasi ini menjadi instrumen strategis yang memungkinkan kualitas layanan publik meningkat tanpa peningkatan anggaran yang signifikan, karena perbaikan kinerja dilakukan melalui optimalisasi sistem informasi.

Penelitian mengenai implementasi Sistem Bukittinggi Gemilang menjadi penting karena hasilnya memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebijakan pelayanan publik digital di daerah. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana aplikasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat, fitur

apa yang perlu dikembangkan atau disederhanakan, serta strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital. Lebih jauh, penelitian ini bermanfaat dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menciptakan aplikasi, tetapi memastikan aplikasi benar-benar memberikan nilai guna bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis aplikasi untuk memahami implementasi Sistem Bukittinggi Gemilang sebagai strategi perbaikan layanan publik berbasis digital (Nurlaila et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menitikberatkan pada pengukuran hubungan kuantitatif antarkomponen, tetapi pada eksplorasi mendalam mengenai efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik daerah. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik dan dokumen resmi, termasuk jurnal nasional mengenai e-government dan smart city, publikasi ilmiah terkait digitalisasi layanan publik, peraturan pemerintah, laporan kebijakan, dan dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Literatur tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran teoretis tentang indikator

keberhasilan layanan publik digital seperti efisiensi birokrasi, efektivitas pemanfaatan teknologi, responsivitas lembaga layanan, partisipasi pengguna, serta perubahan kualitas pelayanan. Studi literatur ini juga penting untuk mengidentifikasi tantangan umum implementasi layanan digital, misalnya kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, resistensi internal birokrasi, dan pengelolaan integrasi sistem antarlembaga (Masa et al., 2023).

Untuk memperkuat hasil kajian, dilakukan analisis aplikasi guna mengevaluasi struktur, fitur, serta kinerja Sistem Bukittinggi Gemilang sebagai layanan publik digital terpadu. Analisis diarahkan pada aspek aksesibilitas, kemudahan penggunaan, desain antarmuka, kejelasan navigasi, kelengkapan menu layanan, kecepatan respons, integrasi antar-instansi, serta ketersediaan sarana pelaporan dan umpan balik pengguna. Evaluasi pengalaman pengguna (*user experience*) juga diperhatikan untuk menilai sejauh mana aplikasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Teknik ini memungkinkan peneliti mengaitkan teori pelayanan publik digital dengan implementasi nyata dalam aplikasi. Dengan menggabungkan studi literatur dan analisis aplikasi, penelitian ini memperoleh dasar komprehensif dalam menilai Sistem Bukittinggi Gemilang tidak hanya sebagai produk teknologi, tetapi sebagai instrumen strategis reformasi

birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil analisis terhadap aplikasi *Sistem Bukittinggi Gemilang* menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berfungsi sebagai portal terpadu layanan pemerintahan berbasis digital di Kota Bukittinggi. Antarmuka awal menampilkan dashboard pengguna dengan identitas akun, menunjukkan bahwa sistem mendukung personalisasi layanan melalui proses login dan verifikasi. Fitur ini mencerminkan orientasi aplikasi pada peningkatan keamanan data dan akuntabilitas pelayanan publik. Tercatat pula informasi ukuran aplikasi yang relatif kecil (24 MB) dan rating pengguna sebesar 4,6/5 dari 36 ulasan, yang mengindikasikan penerimaan dan kepuasan awal masyarakat terhadap aplikasinya.



Gambar 1. Dashboard aplikasi

Temuan pertama pada dashboard aplikasi menunjukkan penyediaan beberapa layanan inti, seperti layanan kelurahan, Dukcapil, pengaduan, dan PPID. Kehadiran menu tersebut membuktikan adanya upaya konsolidasi layanan administratif yang sebelumnya tersebar pada platform berbeda. Dengan demikian, aplikasi berpotensi mengurangi beban administratif dan memperpendek waktu layanan masyarakat. Tampilan menu dibuat sederhana dengan ikon yang representatif sehingga memudahkan navigasi pengguna, terlebih bagi masyarakat umum yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Temuan kedua berasal dari fitur *Domain Kebijakan*, di mana aplikasi menyediakan akses resmi terhadap berita, informasi program, event pemerintah, serta capaian pembangunan Kota Bukittinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai media pelayanan administratif, namun juga sebagai platform transparansi pemerintah daerah. Pada tampilan yang dianalisis, tombol "Buka

Layanan” mengarahkan pengguna langsung ke portal berita resmi, mempercepat akses terhadap kebijakan publik tanpa harus mengunjungi situs terpisah.

Selanjutnya, analisis terhadap fitur *SIHP Bukittinggi* (Sistem Informasi Harga Pangan) memperlihatkan upaya pemerintah dalam menyediakan informasi harga bahan pokok secara real time. Fitur ini penting bagi masyarakat, khususnya pedagang dan konsumen, untuk memantau dinamika harga pangan di pasar local (M. N. Alamsyah, 2017). Sistem pergerakan harga pangan yang dapat diakses langsung melalui aplikasi membuktikan bahwa *Sistem Bukittinggi Gemilang* turut mendukung stabilitas informasi ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa aplikasi telah mengintegrasikan fungsi pelayanan publik, informasi kebijakan, dan informasi ekonomi dalam satu ekosistem digital. Ketersediaan fitur login biometrik serta verifikasi identitas juga memperkuat aspek keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Meskipun belum terlihat fitur *transaction tracking* atau *real-time feedback*, aplikasi sudah memberikan pondasi kuat untuk pelayanan publik berbasis digital dengan dukungan desain antarmuka yang sederhana dan responsif. Dengan cakupan layanan yang terus diperluas, aplikasi ini berpotensi menjadi model tata kelola kota berbasis teknologi yang efektif dan inklusif.

PEMBAHASAN

Implementasi *Sistem Bukittinggi Gemilang* sebagai strategi perbaikan layanan publik berbasis digital menunjukkan transformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah menuju efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi ini sejalan dengan paradigma *e-government* yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan pemerintah–masyarakat (*Government to Citizen*) (Mouter et al., 2021), pemerintah–dunia usaha (*Government to Business*) (A. Alamsyah, 2022), serta internal birokrasi pemerintah (*Government to Government*) (Hermawan et al., 2023). Peralihan layanan publik dari model konvensional ke sistem digital menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan klasik, seperti proses layanan yang lambat, birokrasi panjang, ketidakpastian prosedur, dan minimnya aksesibilitas informasi. Melalui platform ini, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya menciptakan pelayanan publik yang lebih terukur, mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Secara teoritis, implementasi sistem layanan publik digital sesuai dengan konsep *New Public Service (NPS)* yang menempatkan warga bukan sekadar sebagai pelanggan, tetapi sebagai mitra aktif dalam tata kelola public (Ummah, 2022). Sistem Bukittinggi *Gemilang* mengoperasionalkan prinsip tersebut

melalui fitur partisipatif, seperti kanal pengaduan, pelacakan permohonan layanan, dan penyediaan informasi yang transparan tentang proses administrasi. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan ruang untuk turut mengawasi jalannya kinerja pemerintah daerah dan ikut mengambil peran dalam peningkatan pelayanan. Transformasi digital ini juga berkaitan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yang menekankan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Hal ini tercermin dalam desain sistem yang menekankan kesederhanaan antarmuka, kejelasan prosedur, serta ketersediaan layanan yang dapat diakses melalui perangkat digital, baik ponsel maupun komputer (Amalia, 2019).

Sejalan dengan teori tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem digital ini memberikan manfaat instrumental bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah. Dari perspektif masyarakat, manfaat paling signifikan adalah percepatan proses birokrasi, transparansi status layanan, fleksibilitas akses tanpa batasan ruang dan waktu, serta pengurangan potensi pungutan liar karena seluruh proses terdokumentasi dalam sistem. Di sisi lain, bagi pemerintah, hadirnya database yang terintegrasi meningkatkan efisiensi kerja karena pemrosesan data menjadi lebih cepat, minim kesalahan, dan dapat dievaluasi dengan indikator kinerja

yang terukur. Integrasi layanan dalam satu pintu sekaligus memperkecil tumpang tindih pekerjaan antarorganisasi perangkat daerah, sehingga koordinasi internal pemerintah menjadi lebih solid.

Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak terlepas dari tantangan. Dalam perspektif *theory of digital governance*, penerapan teknologi bukan hanya persoalan menyediakan platform digital, tetapi juga memastikan kesiapan sumber daya manusia, regulasi pendukung, infrastruktur digital, dan budaya birokrasi yang adaptif terhadap perubahan. Temuan analisis menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur berkaitan dengan literasi digital menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran layanan. Aparatur harus menguasai penggunaan sistem, mampu memberikan respons cepat terhadap permohonan layanan, serta memiliki kemampuan komunikasi publik yang lebih terbuka. Selain itu, kesiapan masyarakat juga turut menentukan efektivitas penggunaan sistem. Meski akses digital sudah semakin merata, masih terdapat masyarakat – khususnya kelompok usia lanjut dan masyarakat ekonomi rentan – yang belum terbiasa dengan penggunaan layanan online sehingga memerlukan edukasi dan pendampingan.

Isu penting lainnya adalah ketergantungan sistem terhadap stabilitas jaringan internet dan kesiapan infrastruktur server. Jika gangguan teknis terjadi, layanan

publik digital dapat terhenti dan menurunkan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, *governance of technology* menuntut adanya pemeliharaan sistem, pembaruan berkala, dan mekanisme *backup* data untuk menjamin keberlangsungan layanan. Keamanan data menjadi poin kritis mengingat sistem mengelola informasi pribadi masyarakat. Sejalan dengan prinsip *data governance*, Pemerintah Kota Bukittinggi dituntut memastikan perlindungan data, mencegah kebocoran informasi, dan menegakkan etika pemanfaatan data sesuai standar regulasi perlindungan privasi.

Dari sudut pandang pengembangan kebijakan publik, implementasi sistem ini memperlihatkan orientasi pemerintah pada *policy innovation* melalui pemanfaatan digitalisasi. Penerapan sistem Bukittinggi Gemilang bukan sekadar teknologi yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari strategi besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempersempit kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan respons pemerintah. Hal tersebut mendukung cita-cita *good governance* melalui tiga pilar utama: *transparency*, *accountability*, dan *public participation*. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi prosedur layanan secara terbuka. Akuntabilitas tercipta melalui rekam jejak digital yang terekam otomatis, meminimalkan potensi penyimpangan. Partisipasi publik difasilitasi melalui ruang digital untuk

memberikan masukan, kritik, atau laporan terhadap kinerja layanan.

Implementasi layanan publik berbasis digital juga memperkuat daya saing daerah. Kemudahan memperoleh layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, informasi pajak, dan berbagai layanan sosial mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan indeks kepuasan publik. Peningkatan kualitas layanan bukan hanya bagian dari reformasi internal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi strategi pemasaran kota (*city branding*) yang memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun birokrasi modern. Oleh karena itu, sistem Bukittinggi Gemilang berpotensi menjadi model inovasi pelayanan publik daerah yang dapat direplikasi di kota-kota lain di Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan secara keseluruhan menunjukkan bahwa sistem Bukittinggi Gemilang memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan birokrasi konvensional dan memperkuat layanan publik berbasis digital, sesuai tujuan utama penelitian. Analisis teoretis melalui pendekatan NPS, TAM, *digital governance*, dan *good governance* memperlihatkan bahwa implementasi ini bukan hanya perubahan alat kerja, tetapi perubahan paradigma penyelenggaraan pelayanan publik. Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh kolaborasi antara kesiapan pemerintah, kesiapan masyarakat,

infrastruktur teknologi, dan keberlanjutan kebijakan. Digitalisasi layanan publik melalui sistem Bukittinggi Gemilang menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, humanis, dan adaptif terhadap dinamika era digital, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih berintegritas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Bukittinggi Gemilang sebagai strategi perbaikan layanan publik berbasis digital menunjukkan bahwa transformasi layanan melalui teknologi informasi mampu mengatasi berbagai persoalan birokrasi konvensional, seperti proses pelayanan yang lambat, kurang transparan, dan tidak efisien. Digitalisasi layanan terbukti meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, akuntabilitas, dan kualitas relasi antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan layanan satu pintu yang terintegrasi. Sistem ini sejalan dengan prinsip *New Public Service*, *Technology Acceptance Model*, dan *good governance*, sehingga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh partisipasi publik, kesiapan aparatur, dan tata kelola yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan publik melalui Sistem Bukittinggi Gemilang merupakan langkah strategis dalam

reformasi birokrasi daerah menuju pemerintahan yang responsif, adaptif, dan terpercaya.

Meskipun membawa dampak positif yang signifikan, pengembangan sistem ini tetap memerlukan penyempurnaan agar manfaatnya semakin optimal. Pemerintah perlu memperluas program literasi digital bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan teknologi, untuk menjamin keterjangkauan layanan secara merata. Kapasitas aparatur juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan serta pembentukan budaya kerja berbasis kinerja digital. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan yang stabil, keamanan data pengguna, dan sistem pemeliharaan aplikasi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta perlu diperkuat agar inovasi digital terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan evaluasi berkala, Sistem Bukittinggi Gemilang berpotensi menjadi model nasional bagi peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. (2022). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Alamsyah, M. N. (2017). SISTEM

- INFORMASI HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK BERBASIS WEB MOBILE PADA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU Program Studi Sistem Informasi , STMIK Musi Rawas Lubuklinggau Jl . Jend Besar HM Soeharto Kel . Lubuk Kupang Kec . Lubuklinggau Selatan II Kota. *Jusim*, 2(1), 17–27.
- Amalia, G. (2019). ANALISIS PENGARUH E-SERVICELANDSCAPE TERHADAP NET BENEFIT DENGAN E-WALLET VALUE SEBAGAI VARIABEL MEDIATOR DI KOTA TANJUNGPINANG. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24–35. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.127>
- Google Play. (2025). *Sistem Bukittinggi Gemilang-Apps on Google Play*.
- Hermawan, C. S., Heridadi, H., Bambang Wahyudi, Pujo Widodo, & Wilopo, W. (2023). Capacity Of Magelang Regency In Protecting The Historical Site Of Mendut Temple From Mount Merapi Eruption. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(2), 505–510. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.606>
- Jefri Al Hakim, H. A. D. Y., & Asmungi, A. (2024). ANALISIS PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM BUKITTINGGI HEBAT (SBH) KOTA BUKITTINGGI. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Masa, M. A., Abdurrahman, T. S. D., Basalamah, A., Rahman, M. N., Lahmado, H., & Afdhal, A. (2023). Analisis Potensi Teknologi Jaringan 5G Area Sulawesi Selatan. *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 5(1), 41–47. <https://doi.org/10.37905/jjee.v5i1.16870>
- Mouter, N., Shortall, R. M., Spruit, S. L., & Itten, A. V. (2021). Including young people, cutting time and producing useful outcomes: Participatory value evaluation as a new practice of public participation in the Dutch energy transition. *Energy Research and Social Science*, 75(September

2020), 101965.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101965>

Teknologi. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 1(4), 99–111.

Nurlaila, Zuriatin, & Nurhasanah Nurhasanah. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>

Sørensen, K., Levin-Zamir, D., Duong, T. V., Okan, O., Brasil, V. V., & Nutbeam, D. (2021). Building health literacy system capacity: a framework for health literate systems. *Health Promotion International*, 36, 113–123. <https://doi.org/10.1093/heapro/daab153>

Ummah, M. S. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. In *BILDUNG. BILDUNG*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wahyudi, A., & dkk. (2023). Keterampilan yang Dimiliki oleh Tenaga Kerja dengan Tuntutan